

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Faber And Faber, 2006.
- Amir Ilyas & Jupri, “ Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi” Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet.2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Challia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 26
- Djoko Prakoso & Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Dijan Widijowati, dan Halim Darmawan, “*Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*”, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Eddy OS, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Edward O.S Hiariej, “*Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*,” Pidato Ilmiah/Pengukuhan Rektor Universitas Gajah Mada, 2012.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan: Mandar Maju, 2010.
- Hari Sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,

- Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lilik Mulyadi, *“Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime”*, Penerbit Alumni, Indonesia.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, Jakarta: P.T. Alumni, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*. PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem pembuktian dan alat-alat bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983.
- Munir Fuandy, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) bahwa Menurut pasal 183*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Peter Marmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati dinamikanya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat: Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajagafindo Persada, 2013.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika

Aditama, Banudng, 2013.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1982.

B. Jurnal

Achmad, Farhan Fauzie, and Taun Taun. "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4/5/2022.

Adi Syahputra Sirait,. "Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5.2 (2019).

Andri Setiawan, Wiwin Yulianingsih. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amnesti Jurnal Hukum* 5.2 (2023).

Ardiva Naufaliz Azzahra,. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban." *Verstek*, 10/1/2022.

Ardiva Naufaliz Azzahra,. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban." *Verstek* 10.1 (2022):.

Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamji, "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-undangan terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-KTP Irman dan Sugiharto", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3.

Armiar Pahmi, "Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Proses Penegakan Hukum", *USU Law Journal* 7, no.1 (2019) 1-11

Bella Oktaviani,. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Penggelapan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5/1/2016, hlm. 99.

Brieen Kaeng,. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Administratum*, 10/2/2022.

- Coby Elisabeth Mamahit, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Lex Crimen Vol.V/No.6/Ags/2016.
- Dwi Oktavia Ariyanti dan Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2) 2, 2020.
- Fadli Razez Sanjani, Mexsasai Indra. "Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2/2/2015.
- Farhan Fauzie Achmad, Taun Taun, *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan kasus pidana diindonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 nomor 5 Tahun 2022.
- Fathony Karuniawan, "Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jatiswara* 32.2 (2017).
- Firman Wijaya, “Rekontruksi Keadlian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower dan Justice Collaborator” *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.3, No.4, Agustus-Desember 2016.
- Glenn R. Negley, “Justice”, Dalam Lous Shores cd., *Coller’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Coller, 1970.
- Hotman Sitorus, “*Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana*”, *Jurnal Yure Humam*, Vol.1, No1 (2017), Hlm 79.
- Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri Gloriawatu, “ Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru”. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 2 (2022).
- Kornelius Benuf. Muhammad Akbar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, Edisi I, Juni 2020.
- Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2/3/2014.

- Mita, Beniharmoni Harefa Nurasih, Riki Perdana Raya Waruwu. "Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Esensi Hukum* 4.1 (2022).
- Muhammad Rizqi Andia,, and Ismawati Septiningsih. "Pertimbangan Hakim Ditolaknya Pengajuan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Penyuapan (Putusan Nomor 46/Pid. Sus/Tpk/2019/Pn. Jkt. Pst).", *Verstek*, 10/3/ 2020.
- Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya, *et al.*, "Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Interpretasi Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.
- Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto Pranoto. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia.", *Iblam Law Review* 3/1/2023.
- Novrieza Rahmi "Vonis Lebih dari Tuntutan Justru Jadi Alasan KPK untuk Banding" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57601ec618d5c/vonis-lebih-dari-tuntutan-justru-jadialasan-kpk-untuk-banding>.
- Nufus Hidayah, Ade Mahmud. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Nurhikmah Saleh, *Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Uniniversitas Hasanuddin, 2013.
- Isti Latifah Astri dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika", *ILREJ*, Vol 1, No.1, Maret 2021.
- Rahardia F.N dkk, "Praktek Pemidanaan terhadap saksi dan pelaku tindak Pidana yang bekerjasama/ justice collaborator (telaah yurifis putusan no. 14 /pid,b/tpk/2011/pn.jkt.pst pengadilan tipikor Jakarta).
- Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1/2/2017.

- Raihan Andika Santoso dkk, "*Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum positif Indonesia*", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.4 Desember 2023.
- Rika Ekayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015.
- Rini Novita,. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Dalam Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah METADATA*, /3/2023, hlm. 379.
- Riski Nurul Lindiana, Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban (Guna Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019).
- River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, 4/1/2015.
- Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22/2/2015.
- Sri Wulandari, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No.1, April 2017.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia, Perbandingannya Dengan Di Amerika Dan Eropa, *Jurnal Perlindungan*, 1/1/2011.
- Tiffany Harmelia dkk. "Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 05/Pid. Sus-Tpk/2018/Pt. Dki)." *Soedirman Law Review*, 1/1/2019..
- Tomi Hagai Pinem, et al. "Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4/2 /2022.
- Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada

Narapidana Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen Jurnal*, Vol. 2, No. 7, November 2013.

Zhulfiana Pratiwi Hafid,. "Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2019).

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 31. tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan, Huruf I Pasal 14 Ayat 1.

Undang-undang No.13 tahun 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011.

D. Sumber Lainnya.

"5 Arti Kata Pelaku di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://kbbi.lektur.id/pelaku>.

“Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-danijustice-collaborator-i>.

Agus Sapto Aji , Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), Skripsi (Untuk memperoleh program gelar sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Asy Syifa Hanina Fajri, “Kebijakan Formulasi Dan Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan

Kasus Tindak Pidana Korupsi Skripsi” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian Yogyakarta, 2018).

Ayu Diah Pradnya Swari PJ, Ni Nengah Adiyaryani. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana." (2018).

Contoh	Kasus	Justice	Collaborator.
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice-collaborator .			

Diaz Riangga, Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar) Skripsi , (Untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<https://antikorupsi.org/id/article/hukuman-untuk-agus-condro-disesalkan> . Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 pada pukul 07:50.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara>.

<https://news.detik.com/berita/3229362/kasus-korupsi-infranstruktur-maluku-abdul-khoir-dibui-4-tahun>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929231312-12-552478/ma-potong-hukuman-2-terpidana-korupsi-kasus-e-ktp>.

<https://www.suara.com/news/2023/02/17/112809/agus-condro-hingga-richard-eliezer-sederet-terdakwa-ini-berperan-jadi-justice-collaborator>.

Ihfa Rahmawati, *Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Studi Putusan No. 32/Pid. Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Ardan Khandari, Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara tindak Pidana Korupsi (Guna memperoleh Gelar Sarjana) Fakultas Hukum Universitas

Lampung Bandar Lampung, 2021).

Muhammad Yasin, “Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak Sih?”

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan-- boleh-nggak-sih](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih).

Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Tommy Sumardi, perantara dikasus Red Notice di tuntutan 1,5 tahun penjara.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/17031671/tommy-sumardi-perantara-di-kasus-red-notice-djoko-tjandra-dituntut-15-tahun>.

